



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Perkembangan *One Million Signatures Campaign* Sebagai Gerakan Sosial
Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Iran**

Skripsi

Oleh

Monica Vira Ajeng Kristanti

2015330148

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Perkembangan *One Million Signatures Campaign* Sebagai Gerakan Sosial
Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Iran**

Skripsi

Oleh

Monica Vira Ajeng Kristanti

2015330148

Pembimbing

Elisabeth A.S Dewi, Ph.D

Bandung

2018

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Monica Vira Ajeng Kristanti

NPM : 2015330148

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Perkembangan *One Million Signatures Campaign* Sebagai Gerakan Sosial Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Iran

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Januari 2019

Monica Vira Ajeng Kristanti

2015330148

ABSTRAK

Nama : Monica Vira Ajeng Kristanti

NPM : 2015330148

Judul : Perkembangan *One Million Signatures Campaign* Sebagai Gerakan Sosial Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Iran

Kesetaraan gender merupakan salah satu agenda penting dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Maka dari itu, penting bagi tiap negara untuk menjamin kepentingan tersebut pada masyarakatnya. Nyatanya, pemerintah Iran seakan mengabaikan hal tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak baik melalui organisasi non-profit maupun individu. *One Million Signatures* merupakan salah satu gerakan sosial yang memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mewujudkan kesetaraan gender di Iran. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah “***Bagaimana perkembangan One Million Signatures Campaign sebagai Gerakan Sosial untuk mewujudkan kesetaraan gender di Iran?***”. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pluralisme untuk menunjukkan partisipasi masyarakat non-pemerintah, feminisme liberal untuk menunjukkan peran dari *One Million Signatures* sebagai salah satu gerakan sosial yang bergerak untuk mencapai kesetaraan, teori hak asasi manusia untuk menunjukkan bentuk ketisaksetaraan yang terjadi di Iran yang disebabkan oleh pemerintahannya sendiri, serta teori gerakan sosial untuk menunjukkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh *One Million Signatures* untuk mewujudkan kesetaraan. Adapun tahapan-tahapan yang dibahas dalam penulisan ini adalah dengan melakukan aksi *the Solidarity Day*, menetapkan dokumen utama kampanye, melakukan kampanye dari rumah ke rumah, *the Green Movement*, hingga melakukan aksi protes tanpa menggunakan hijab.

Keywords: *One Million Signatures*, Gender, Iran, Perempuan

ABSTRACT

Name : Monica Vira Ajeng Kristanti

NPM : 2015330148

Title : *The Development of One Million Signatures Campaign as a Social Movement in order to Achieve Gender Equality in Iran*

*Gender equality is an important agenda in Sustainable Development Goals (SDGs), and it's an important task for a country to ensure those rights for their people. In Iran, the government seems disregard the issue itself. It creates various reactions from a lot of faction such as NGOs and individuals. One Million Signatures is one of the social movement which gives a lot of impact on gender equality in Iran. This research's submitted research question is "**How was the progress of One Million Signatures Campaign as a Social Movement to achieve gender equality in Iran?**". The analytical framework used in this research are pluralism for showing non-governmental people participation, liberal feminism to show the role of One Million Signatures as one of NGO and social movement that acted to achieve gender equality, human rights theory to show the inequality that occurs in Iran caused by their own government, and also social movement theory to show One Million Signatures' stages on achieving gender equality. There's also some effort to achieve gender equality such as The Solidarity Day act, establish a campaign important document, door to door campaign, The Green Movement, and also a protest without wearing hijab.*

Keywords: One Million Signatures, Gender, Iran, Woman

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Perkembangan *One Million Signatures Campaign* Sebagai Gerakan Sosial Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Iran”** dengan tepat waktu. Adapun, penelitian ini diajukan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh *One Million Signatures Campaign* Iran untuk mewujudkan kesetaraan yang selama ini tidak mereka dapatkan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi masyarakat luas mengenai isu gender, serta bentuk gerakan sosial yang dilakukan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis selama penelitian ini dilakukan, yaitu kepada keluarga penulis yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, doa, dan semangat. Penulis juga hendak berterimakasih kepada Mba Elisabeth A.S Dewi, PhD (Mba Nophie), selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, kritik dan saran, serta kesabaran selama proses bimbingan, kiranya Tuhan memberikan berkatnya pada Mba Nophie sekeluarga.

Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar

penelitian ini nantinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Penulis juga berharap penelitian dapat memberikan pengetahuan baru bagi para pembaca. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian, serta maaf apabila ada hal-hal yang kurang sesuai maupun kurang berkenan bagi pembaca dalam penulisan ini.

Bandung, 21 Desember 2018

Monica Vira Ajeng Kristanti

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang Ia berikan kepada saya hingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktunya, serta segala bimbingan dan berkat yang Ia berikan selama 3,5 tahun berkuliah di HI Unpar.
2. Kepada kedua orangtua saya yang selalu memberikan dukungan, doa, hiburan, maupun support secara finansial, yang akhirnya memberikan kekuatan dan semangat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta dukungan yang diberikan selama saya berkuliah dan selalu mendukung apapun kegiatan yang saya lakukan selama menjadi mahasiswa.
3. Kepada kakak dan adik saya, mas Vito dan dek Vita, terimakasih telah memberikan semangat dan juga dukungan selama saya menyelesaikan skripsi ini, maupun selama saya berkuliah.
4. Teruntuk Mbak Nophie, selaku pembimbing atas kesabarannya dalam memberikan kritik dan saran, serta motivasi agar skripsi ini berjalan dengan lancar, mulai dari menyempatkan waktu untuk bimbingan, meminjamkan buku, dan lain sebagainya. Setiap selesai bimbingan, selalu dengan kalimat “Kita lihat nanti kamu kapan bisa selesai satu bab ini”, yang membuat saya selalu termotivasi untuk mengerjakan dengan cepat. Sekali lagi terimakasih banyak Mbak Nophie.
5. Teruntuk Mas Abe dan Mbak Syl, selaku penguji saya pada sidang tanggal 9 Januari 2019, saya berterimakasih karena mas dan mbak telah memberikan saran dan kritik, serta revisi yang berguna bagi skripsi saya agar menjadi lebih layak untuk dikumpulkan daripada sebelumnya. Meskipun tidak sempurna, tetapi skripsi ini sekarang telah menjadi lebih baik dari sebelumnya.
6. Terimakasih pula kepada seluruh dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya selama 3,5 tahun saya berkuliah di HI Unpar. Ilmu yang diberikan oleh para dosen sangat berguna bagi skripsi saya, serta bagi

kegiatan sehari-hari saya, baik saat melakukan magang, *part time*, maupun dalam berorganisasi/kepanitiaan. Saya juga berterimakasih kepada seluruh staf di gedung 3, yang telah membantu agar proses belajar-mengajar berjalan dengan sebaik mungkin.

7. Terimakasih kepada teman-teman yang turut membantu proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih kepada Farras yang selalu membantu saya mengerjakan skripsi setiap hari sampai subuh di tempat kopi. Untuk Pauline, Tasha, dan Patty sebagai teman-teman belajar dan bermainku, terimakasih bantuannya selama UTS/UAS/Tugas-tugas selama di Unpar. Untuk Sabna, terimakasih, mari kita tutup dengan nongkrong seharian di Bene. Untuk teman kuatku Santi, makasih sudah memberikan “pengalaman” yang menyenangkan selaman 2 tahun kebelakang, begitu juga dengan jajaran lainnya. Untuk teman-teman Van Lith ku yang masih mendukung dan menanyakan kabar, atau sekedar bersendagurau via twitter, terimakasih karena masih inget aku, terutama untuk Ajeng, Ratih, Louis, dan Bagas. *Special thanks* khusus untuk Aldi Panjaitan karena bantuin bikin footnote dan halaman, langsung dari Antapani ke Ciumbuleuit!
8. Masih banyak pihak lainnya yang belum sempat saya sebutkan satu-satu, namun membantu saya selama proses perkuliahan, maupun selama proses pengerjaan skripsi, maka dari itu, saya ucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak tersebut. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang kalian berikan kepada saya. Amin.

Bandung, 16 Januari 2019

Monica Vira Ajeng Kristanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.2.1 Deskripsi Masalah	8
1.2.2 Pembatasan Masalah	11
1.2.3 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Kajian Literatur	13
1.5 Kerangka Pemikiran	17
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	23
1.6.1 Metode Penelitian	23
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	24
1.7 Sistematika Penulisan	24

BAB II.....	25
Latar Belakang Terjadinya Ketidaksetaraan Gender di Iran.....	25
2.1 Sejarah Revolusi Iran 1979 dan Basis Fundamental Islam Khomeini Terhadap Perempuan.....	25
2.2 Dasar Hukum Iran yang Mendiskriminasi Perempuan	28
2.3 Ketidaksetaraan Gender yang Terjadi di Iran	35
BAB III	43
Kampanye <i>One Million Signatures</i> Sebagai Salah Satu Langkah Mewujudkan Kesetaraan Gender di Iran.....	43
3.1 Gerakan Sosial Perempuan di Iran Pasca Revolusi Iran	43
3.2 Kampanye ‘ <i>One Million Signatures</i> ’	45
3.3 Gerakan Sosial Perempuan Iran Pasca Kampanye <i>One Million Signatures</i> dan Tanggapan Masyarakat Internasional	51
BAB IV	60
4.1 Tahap <i>Emergence</i>	60
4.1.1 <i>The Solidarity Day</i>	61
4.1.2 Menetapkan Tiga Dokumen Dasar <i>One Million Signatures Campaign</i> .	62
4.2. Tahap <i>Coalescence</i>	70
4.2.1 Mengumpulkan Tanda Tangan dan Dukungan Masyarakat pada tahun 2007.....	70
4.3 Tahap <i>Bureaucratization</i>	72
4.3.1 <i>The Green Movement</i>	73
4.3.2 Mengeluarkan Pernyataan Terkait Hilangnya Aktivistis Perempuan, Bersama dengan LDHII tahun 2011	76
4.3.3 Melakukan Aksi Protes Tanpa Menggunakan Hijab Pada Awal Tahun 2018.....	80

4.4 Tahap Decline	81
BAB V.....	83
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengaruh Gender Terhadap Poin SDGs.....	3
Tabel 2 Jumlah perempuan dalam parlemen 1979-2006	37

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara diharapkan mampu memenuhi lima nilai dasar yaitu, keadilan, ketertiban, kesejahteraan, keamanan, dan hak asasi manusia. Nilai-nilai dasar ini seharusnya menjadi suatu patokan bagi masing-masing negara untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini, negara, dengan berbagai macam ideologi dan sistem pemerintahan, diharapkan mampu memberikan kesejahteraan dalam bentuk lima nilai dasar tersebut. Pemerintah negara dituntut mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan pihak manapun¹. Pada era globalisasi saat ini, negara tidak hanya menghadapi apa yang dikatakan sebagai kemandirian tradisional yang berfokus kepada militer, politik, maupun peperangan semata. Pada masa ini, negara menghadapi permasalahan-permasalahan yang lebih besar seperti masalah ekonomi, budaya, sosial, serta kesejahteraan individu².

Ketidaksetaraan gender, merupakan salah satu isu keamanan non-tradisional yang seringkali terjadi karena adanya persepsi-persepsi tertentu tentang

¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relation: Theories and Approaches*, (United Kingdom, Oxford University Press, 2010)

² Shahr Hameiri, "Probing the Links Between Political Economy and Non-traditional Security: Themes Approaches, and Instrument" , *International Politics, suppl. Special Issue: Political Economy and The New Security* 52, no. 4 (2015), 371-388, diakses pada 17 Februari 2018 <https://search.proquest.com/docview/1685659035/80E1A3FC4B4B4317PQ/3?accountid=31495>

perempuan, dan telah menjadi permasalahan yang sifatnya global, karena hingga saat ini ketidaksetaraan gender masih banyak ditemui di berbagai negara, dengan berbagai latar belakang. Seperti yang tertulis dalam SDG poin 5 PBB “*Achieve gender equality and empower all women and girls*”, kesetaraan gender merupakan salah satu langkah mewujudkan kesejahteraan individu. Kesetaraan gender menjadi penting karena, banyak sekali potensi dari para perempuan yang tidak dapat tersalurkan dengan baik, karena adanya beberapa faktor yang menghalang mereka untuk melakukan hal tersebut, seperti adanya pernikahan anak yang dapat menghalang perempuan untuk mendapatkan edukasi yang lebih tinggi, adanya kesenjangan gaji di berbagai sektor pekerjaan, hingga kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang politik³.

Kesetaraan gender pun telah menjadi bagian dari Hubungan Internasional, atas dasar adanya kesadaran mengenai sedikitnya partisipasi perempuan dalam perekonomian suatu negara⁴. Sejak dulu, dalam berbagai konflik yang terjadi, baik dalam peperangan, maupun konflik internal suatu negara, perempuan akan ditinggal oleh suaminya untuk berperang, dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Namun, perempuan akan cenderung menjadi korban dari penculikan, pemerkosaan, serta perbudakan. Sementara laki-laki akan mati dengan atas nama membela negara⁵. Selain itu, partisipasi perempuan dalam penetapan kebijakan,

³“Gender Equality: Why it Matters”, *United Nation*, diakses pada 17 Februari 2018 http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/5_Why-it-Matters_GenderEquality_2p.pdf

⁴ Scott Burchill dan Andrew Linklater, *Theories of International Relation*, (New York: ST Martin’s Press 1996) 289

⁵ Ibid.

juga masih sangat rendah, serta adanya *gap* atau jarak perbandingan penghasilan antara laki-laki dan perempuan, saat melakukan pekerjaan yang sama.

Pada bulan September 2015, dalam penetapan poin-poin dan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), *gender equality* menjadi salah satu patokan dalam mewujudkan 17 *goals* dalam SDGs lainnya, seperti⁶;

Tabel 1 Pengaruh Gender Terhadap Poin SDGs

Poin	Agenda	Isu Gender yang Diangkat
1	<i>No Poverty</i>	Sebanyak 124 perempuan usia 25-34 tahun terjebak dalam kemiskinan, bila dibandingkan dengan 100 orang laki-laki
2	<i>Zero Hunger</i>	Perempuan yang mengalami <i>food insecurity</i> lebih banyak 11% dibandingkan dengan laki-laki.
3	<i>Good Health and Well Being</i>	Pada tahun 2015, terdapat 303,000 kasus kematian perempuan yang disebabkan oleh kehamilan yang kurang sehat, maupun kematian saat melahirkan
4	<i>Quality Education</i>	Terdapat 15 juta anak perempuan yang tidak dapat menempuh pendidikan yang seharusnya, dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki
5	<i>Gender Equality</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari 19% perempuan di seluruh dunia pernah mengalami pelecehan seksual. - Hingga saat ini masih banyak suami yang melarang istrinya untuk dapat bekerja. - Lebih dari 750 juta anak perempuan di seluruh dunia terpaksa mengalami pernikahan dini
6	<i>Clean Water and Sanitation</i>	Di Afrika, para perempuan seringkali dijadikan tumbal untuk memenuhi kebutuhan air, demi memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, dengan segala resiko yang mengancam (jarak

⁶ "Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development", *UN Women*, diakses pada 17 Februari 2018 <http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-summary-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=949>

		untuk mencari air bersih sangat jauh sehingga terkadang banyak perempuan yang harus keluar sehari-hari demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, banyak anak perempuan yang turut diajka sehingga mereka pun tidak dapat bersekolah dengan baik)
7	<i>Affordable and Clean Energy</i>	6 dari 10 orang yang menjadi korban atas polusi rumah tangga adalah perempuan. Polusi rumah tangga telah menyebabkan kematian sebanyak 4.3 juta orang, dan perempuan merupakan korban utamanya.
8	<i>Decent Work and Economic Growth</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Perempuan merupakan korban utama dari adanya kesenjangan gaji (wage gap), dengan total sebanyak 23%. - Perempuan yang berpartisipasi dalam dunia kerja (buruh) hanya sebanyak 63%, sementara laki-laki mencapai 93%
9	<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>	Hanya 28,8% perempuan yang telah berpartisipasi dalam penelitian
10	<i>Reduced Inequality</i>	Penghasilan perempuan lebih rendah daripada laki-laki kurang lebih sebanyak 50%
11	<i>Sustainable Cities and Communities</i>	Daerah kumuh dengan sanitasi yang kotor akan lebih merugikan perempuan dari segi kebersihan. Perempuan cenderung lebih rentan terjangkit penyakit seksual yang disebabkan oleh sanitasi buruk. Perempuan yang sedang menstruasi pun sangat memerlukan sanitasi yang baik karena akan lebih mudah terserang penyakit.
12	<i>Responsible Consumption and Communities</i>	Perkembangan infrastruktur sangat penting. Hal ini terjadi karena perempuan dianggap lebih membutuhkan transportasi yang lebih memadai dibandingkan dengan laki-laki.
13	<i>Climate Action</i>	Pemanasan global memiliki memiliki efek yang lebih berat pada perempuan, karena perempuan 14x lebih mudah mengalami berbagai ancaman penyakit dan kematian, bila dibandingkan dengan laki-laki.

14	<i>Life Below Water</i>	Kontaminasi air bersih dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan baik bagi laki-laki maupun perempuan, terutama pada anak-anak.
15	<i>Life on Land</i>	Adanya deforestasi yang terjadi dari tahun 2010 hingga 2015, memakan lebih dari 4,3 juta hektar hutan, menyebabkan bekurangnya mata pencaharian baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal di <i>rural areas</i>
16	<i>Peace, Justice, and Strong Institution</i>	Pada saat terjadi konflik, laki-laki cenderung meninggal karena melakukan penyerangan atau pertahanan, dan menjadi korban perang. Sementara, perempuan cenderung menjadi korban pelecehan selama masa konflik, penculikan, bahkan penyiksaan
17	<i>Partnership for Goals</i>	Sejak tahun 2012, pengeluaran negara seringkali tidak menghiraukan kesetaraan gender.

Sumber: "Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development", *UN Women*, diakses pada 17 Februari 2018 <http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-summary-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=949>

Salah satu hal yang mempengaruhi adanya ketidaksetaraan gender adalah adanya kepercayaan maupun budaya yang telah menjadi kebiasaan turun temurun. Gagasan-gagasan yang bersifat agamis memiliki peranan yang kuat dalam masyarakat, namun hal ini seringkali dilakukan untuk kepentingan/golongan masyarakat tertentu, dan dilihat dari segi materialisme⁷. Pada dasarnya, adanya pengaruh agama ini hendaknya diwujudkan apabila telah mengalami kesesuaian dengan kelompok sosial maupun kelas-kelas yang ada⁸. Dengan adanya pernyataan tersebut, secara tidak langsung mengatakan bahwa adanya budaya yang dipengaruhi agama, haruslah bersifat fleksibel dan dapat diterima masyarakat dari kelas atau kelompok lain, dan sifatnya tidak dapat dipaksakan.

⁷ Dr. Zayar, *Revolusi Iran: Sejarah dan Hari Depan*, (Yogyakarta: Sumbu 2002) 63

⁸ *Ibid.* 63

Dalam hal ini, suatu negara memiliki peran penting, dalam mewujudkan hidup berbudaya dan beragama bagi masyarakatnya. Negara pun diwajibkan untuk dapat memfasilitasi kepercayaan, serta kebudayaan dari masyarakatnya, seperti, membangun fasilitas rumah ibadah, memberikan rasa aman bagi masing-masing agama untuk menjalankan ibadahnya, memberikan kenyamanan bagi masyarakat beragama untuk dapat merayakan hari besar mereka tanpa adanya rasa takut, serta menciptakan kebijakan-kebijakan yang adil bagi setiap masyarakat beragama.

Islam merupakan salah satu agama yang memiliki basis fundamentalisme yang sangat mempengaruhi sejarah. Hingga kini, Islam meninggalkan banyak situs, ilmu, hingga tata pemerintahan yang masih digunakan hingga saat ini. Islam memberikan pengajaran yang telah sesuai dengan ajaran-ajaran kebaikan yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan meninggalkan berbagai bentuk kebudayaan yang saat ini tetap dilakukan, seperti adanya kewajiban untuk menggunakan hijab bagi perempuan, serta ketentuan batas aurat yang berbeda bagi tiap gender. Hal ini sering menjadi mispersepsi bagi banyak orang yang tidak mengenal Islam secara lebih lanjut, tetapi juga dapat menjadi mispersepsi bagi mereka yang beragama Islam itu sendiri, sehingga seringkali digunakan secara kurang baik oleh orang-orang dengan kepentingan-kepentingan tertentu, sebagai alasan untuk memandang perempuan tidak setara dengan laki-laki.

Iran merupakan salah satu negara dengan sistem pemerintahan yang berbasis agama, yaitu Islam. Sebagai negara yang mengimplementasikan nilai-nilai Islam didalamnya, Iran seakan tidak dapat membentuk kebijakan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Iran seringkali menimbulkan kontroversi karena kebijakan-

kebijakannya yang dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia, dan cenderung tidak memenuhi lima nilai dasar negara. Salah satunya adalah tentang bagaimana Iran tidak memenuhi kewajibannya sebagai negara, untuk dapat memberdayakan masyarakatnya tanpa memandang gender. Berdasarkan penafsiran pemerintah Iran terkait laki-laki, yang merupakan sosok kepercayaan Allah, pernyataan ini sering disalahgunakan untuk menyatakan ketidakmampuan perempuan, dan membatasi ruang gerak para perempuan Iran melalui berbagai hal seperti penggunaan hijab dan cadar yang diwajibkan dalam hukum, pernyataan mengenai peran perempuan dalam keluarga, serta pernyataan bahwa laki-laki berhak mempoligami istri, namun tidak sebaliknya.

Setelah Revolusi Iran pada tahun 1979, pemerintah mencantumkan hal-hal yang tidak dianggap penting dalam hukum, yang malah memberikan kesan tidak menyenangkan bagi perempuan, salah satunya adalah dengan mengatur cara berpakaian perempuan yang mewajibkan perempuan untuk menggunakan hijab saat berpergian, hingga melarang perempuan untuk melakukan penerbangan atau perjalanan tanpa membawa surat izin dari wali laki-laki⁹.

Hal ini tentu menjadi masalah yang cukup besar bagi perempuan-perempuan Iran, serta menimbulkan ketidakadilan bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana hal-hal tersebut memberikan pengaruh terhadap terbentuknya gerakan sosial *One Million Signature Campaign*, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan tersebut.

⁹ Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic; Emerging Voices in Women's Movement, Shiren Mahdavi, *The Middle East Journal* vol 57, iss 24 (2003) (695-698), diakses pada 17 Februari 2018 <https://search.proquest.com/docview/218529446/4547721EE2FD4FA3PQ/3?accountid=31495>

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Iran merupakan salah satu negara dengan basis pemerintahan berdasarkan agama Islam, dan memiliki berbagai aturan hukum yang didasari oleh agama Islam pula. Adanya basis Islam yang dianut oleh Iran ini berawal dari Revolusi Iran pada tahun 1979. Revolusi Iran terjadi karena masyarakat Iran mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Shah, sehingga banyak melakukan aksi demo dan protes, yang dilakukan oleh masyarakat terutama dari kelas pekerja¹⁰. Sejak saat setelah revolusi itu terjadi, Iran dipimpin oleh Khomeini yang memiliki basis kepemimpinan dengan gaya Islam¹¹.

Hal ini menjadi salah satu bentuk ketidakadilan yang dirasakan pada perempuan di Iran. Peraturan dan dasar hukum yang berlaku di Iran seakan tidak berpihak pada perempuan, mulai dari urusan berkeluarga hingga pakaian yang harus digunakan. Peraturan ini pun tidak semata-mata diberlakukan khusus bagi perempuan dengan agama Islam yang tinggal di Iran, melihat terdapat kurang lebih 1% perempuan di Iran yang memiliki agama yang berbeda¹². Namun, setiap perempuan yang tinggal di Iran, dengan agama yang berbeda sekalipun, diwajibkan untuk memenuhi aturan-aturan dasar. Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu ayat Al Quran yang berbunyi, "*Untukmu agamamu, dan untukku, agamaku.* (QS Al Kafirun: 6)". Ayat tersebut menyatakan bahwa

¹⁰ Iran: Sejarah dan Hari depannya

¹¹ Ibid.

¹² "Iran Population 2018" World Population Review, diakses pada 20 Desember 2018 <http://worldpopulationreview.com/countries/iran-population/>

sebagai Muslim, tidak perlu ikut campur permasalahan orang dengan agama lain, yang diperkuat dengan ayat “*Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir* (QS Al Kahfi: 29)”, yang berarti bahwa Islam akan membiarkan mereka yang memiliki agama yang berbeda untuk melakukan apapun sesuai dengan konsekuensi yang telah tertulis pula dalam Al Quran, dan sebagai Islam, lebih baik melepaskan diri dari mereka¹³. Adanya aturan di Iran yang memaksakan adanya aturan berbasis agama kepada mereka dengan agama lain, hanya merupakan bentuk patriarki yang ada di Iran, yang dibungkus dengan label agama. Pernyataan ini juga diperkuat dengan banyaknya perempuan Muslim Iran yang bahkan menolak diberlakukannya aturan-aturan tersebut.

Adapun, hukum-hukum yang menunjukkan ketidakadilan bagi perempuan Iran akan dibahas lebih lanjut pada Bab 2. Ketidakadilan lainnya yang dirasakan oleh perempuan Iran adalah adanya kewajiban bagi tiap perempuan Iran yang ingin berpergian tanpa ditemani siapapun dengan usia maksimal 40 tahun, diwajibkan untuk menunjukkan surat izin dari wali laki-laki¹⁴. Selain itu, perempuan Iran juga dilarang untuk masuk ke stadium olahraga.

Adanya peraturan-peraturan yang tertulis secara hukum maupun aturan yang berasal dari adanya budaya dan masyarakat, telah merugikan banyak perempuan Iran, karena mereka seakan tidak dapat menyuarakan apa yang mereka inginkan,

¹³ “Bagimu Agamamu, Bagiku Agamaku”, *Ukhuwah Islamiyah*, 2013, diakses pada 18 Februari 2018 <https://ukhuwahislamiyah.com/bagimu-agamamu-bagiku-agamaku/>

¹⁴ Kaveh Taheri “Iranian Women Still Denied Fundamental Rights”, *Huffpost*, diakses pada 18 Februari 2018 <https://www.huffingtonpost.com/kaveh-taheri/iranian-women-still-denied-b-9607430.html>

serta tidak dapat menerima hak-hak yang sebagaimana para laki-laki Iran dapat rasakan. Hal inilah yang memacu para perempuan untuk dapat mewujudkan hak-hak mereka dalam negaranya, dengan melakukan berbagai gerakan yang diharapkan mampu mengubah pemikiran pemerintah Iran.

Gerakan *One Million Signatures* merupakan salah satu bentuk gerakan sosial yang awalnya dilakukan oleh perempuan-perempuan Iran dalam mencapai keadilan yang seharusnya. Terbentuknya *One Million Signatures Campaign* merupakan salah satu upaya dari para aktivis dan perempuan yang dapat dikatakan “*Out of the box*” karena gerakan-gerakan perempuan sebelumnya tidak banyak memberi pengaruh bagi masyarakat. *One Million Signatures Campaign* bertujuan untuk menggerakkan perempuan Iran, untuk dapat bersatu dibawah segala ketidakadilan yang ada, untuk bersuara, dan menentang kebijakan pemerintahan yang kurang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara adil. Gerakan ini juga diharapkan mampu untuk menyatukan seluruh perempuan dari berbagai latar belakang¹⁵.

Selama menjalani masa kampanyenya, lebih dari 50 orang aktivis yang tergabung dalam *One Million Signatures*, ditahan karena dianggap sebagai perusuh. Adanya penangkapan yang dilakukan oleh kubu pemerintah terhadap para aktivis, tidak menyurutkan semangat para perempuan Iran untuk melakukan

¹⁵“The One Million Signature Campaign: Working for Equality in Iran”, *Tavaana*, diakses pada 18 Februari 2018 <https://tavaana.org/sites/default/files/One%20Million%20Signatures%20PDF.pdf>

aksi yang hampir serupa di tahun-tahun selanjutnya, dan berakhir dengan penahanan para aktivis, karena dianggap sebagai ancaman dan intimidasi¹⁶.

Iran merupakan salah satu *Executive Board* dari UN Women. Dalam hal ini, sudah sepatutnya Iran mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya karena tentu akan dianggap sebagai panutan bagi UN Women dalam mewujudkan kesetaraan gender, sesuai dengan visi misi dari UN Women¹⁷.

Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut dapat membantu penelitian ini untuk melihat perkembangan serta tahapan-tahapan yang dilakukan oleh *One Million Signatures*.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan akan dilakukan dengan memperhatikan 3 hal seperti, aktor, waktu, dan isu. Aktor yang menjadi subjek penelitian ini adalah Gerakan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Iran, sebagaimana perempuan-perempuan Iran telah berusaha melakukan berbagai gerakan seperti *One Million Signatures*. Dari segi pembatasan waktu, akan dimulai pada tahun 2006 saat kampanye *One Million Signatures* dimulai di Iran, hingga 2018 tepatnya pada bulan Februari, dimana permasalahan ini masih berlanjut hingga saat ini dan gerakan-gerakan masih terus dilakukan oleh UN Women dan perempuan-perempuan Iran. Isu yang dibahas pada kasus adalah kesetaraan gender dan feminisme yang merupakan tujuan dari *One Million Signatures* itu sendiri, serta *human rights* atau Hak Asasi

¹⁶ "Women In Iran Arrested Over Protest", *BBC*, 2007, diakses pada 18 Februari 2018 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6416789.stm

¹⁷"UN Women Executive Board Members", *UN Women*, diakses pada 19 Februari 2018 <http://www.unwomen.org/en/executive-board/members>

Manusia, dimana pemerintah Iran dirasa tidak dapat memenuhi kesejahteraan masyarakatnya.

1.2.3 Perumusan Masalah

Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh perempuan Iran untuk mewujudkan kesetaraan gender, telah memancing perhatian dunia internasional termasuk UN Women. Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana *One Million Signatures Campaign* berkembang menjadi gerakan sosial dalam mewujudkan kesetaraan gender di Iran?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dari awal terbentuknya *One Million Signatures Campaign*, hingga saat ini, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Iran.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Memberikan penggambaran mengenai usaha perempuan Iran untuk mengatasi adanya isu ketidaksetaraan gender yang terjadi di Iran.

1.4 Kajian Literatur

Menurut artikel jurnal “*Iranian Women Struggles and Status Since 1979*” oleh Nikkie Kiddie, mengatakan bahwa perempuan Iran telah mengalami berbagai ketidakadilan semenjak adanya revolusi Iran pada Februari 1979, dengan pemerintahan yang patriarki, dimana perempuan seakan berada diposisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan seringkali menerima konotasi-konotasi jelek apabila bertindak tidak sesuai dengan apa yang berlaku. Ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan juga diceritakan dalam buku ini. Tentang bagaimana perempuan diharuskan untuk menutup diri menggunakan cadar, dan pada masa itu, masih diberlakukan hukuman cambuk bagi mereka yang melanggar. Di satu sisi, laki-laki bebas menggunakan pakaian apapun saat bepergian. Terence juga menyebutkan bahwa beberapa perempuan bercadar sebenarnya telah menyadari adanya ketidakadilan ini sejak lama.

Adanya pendapat yang sama baik dalam artikel maupun dalam buku, menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender benar terjadi di Iran, dan telah disadari oleh baik masyarakat Iran sendiri, dan juga duni Internasional. Maka dari itu, diperlukan sebuah bentuk kesadaran serta gerakan baik dari masyarakat maupun dunia internasional untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut artikel jurnal *Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic; Emerging Voices in Women's Movement*, Shiren Mahdavi, *The Middle East Journal* vol 57, iss 24(695-698), Partisipasi manusia dalam kehidupannya ditentukan dari dua hal, pertama, secara biologis seorang perempuan atau laki-laki, dan secara sosial, yang kebanyakan dipengaruhi oleh budaya dan agama

seseorang. Namun idealnya, jenis kelamin bukanlah halangan bagi tiap orang untuk dapat menjalankan apa yang mereka inginkan, dan tidak diganggu gugat oleh kehidupan sosial seseorang. Artikel jurnal ini juga menjelaskan perbedaan yang ada pada perempuan dan laki-laki berdasarkan kitab suci Al Quran, yang menyatakan bahwa laki-laki merupakan sosok kepercayaan Allah, sehingga pernyataan ini sering disalahgunakan untuk menyatakan ketidakmampuan perempuan, dan mengeksploitasikan perempuan dengan berbagai hal. Hal inilah yang seakan memberikan semangat bagi perempuan Iran untuk melakukan berbagai usaha protes dan demo untuk menegakkan keadilan¹⁸. Hal ini memunculkan gerakan feminis baru bernama “*Islamic Feminist*”. Selain itu, menurut artikel jurnal “*From Tehran to Los Angeles to Tehran: Transnational Solidarity Politics in One Million Signatures Campaign to End Discriminatory Law*”, *Women Studies Quarterly*, Catherine Sameh vol 42 iss 3, menunjukkan bahwa usaha dan partisipasi dari aktivis-aktivis Iran dalam *One Million Signature Campaign* telah membentuk sikap simpati bagi negara-negara lain, dan meningkatkan solidaritas atas nama kemanusiaan. Informasi mengenai kampanye tersebut dengan cepat meluas melalui bantuan internet, dan seakan menjadi fenomena bagi dunia internasional, tentang adanya solidaritas kemanusiaan yang terjadi (khususnya di Los Angeles, lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis artikel jurnal, Catherine Sameh)¹⁹.

¹⁸ Shiren Mahdavi “Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic: Emerging Voices in Women’s Movement”, *The Middle East Journal* 57, 24 (695-698)

¹⁹ Catherine Sameh “From Tehran to Los Angeles to Tehran: Transnational Solidarity Politics in One Million Signature Campaign to End Discriminatory Law”, *Women Studies Quarterly* 42, 3

Dari kedua artikel jurnal tersebut, kita dapat melihat bahwa perempuan Iran terus berusaha untuk mencari keadilannya. Adapun *One Million Signatures Campaign* menarik perhatian dunia internasional, sehingga negara seperti Pakistan pun terinspirasi untuk membuat gerakan yang serupa. Aksi yang dilakukan oleh para perempuan Iran pun tidak sekedar berprotes dipinggir jalan, tetapi termasuk juga dengan melakukan pengajaran, kampanye kepada sesama perempuan dan anak-anak, agar mereka mampu membuka pikiran mereka tentang kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat inspiratif, dan feminis-feminis dari luar Iran pun turut menyerukan suara bagi perempuan-perempuan Iran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan yang dilakukan perempuan Iran, meskipun belum dapat mengubah pemikiran pemerintah Iran, tetapi dapat menyatukan solidaritas para feminis dari seluruh dunia.

Buku berjudul “Iran: Sejarah dan Hari Depan”, memberikan penggambaran mengenai Revolusi Iran di tahun 1979, yang menjadi salah satu titik dri adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi di Iran, serta basis fundamentalisme Islam yang menjadi basis pemerintahan Iran. Buku ini menceritakan perjuangan masyarakat Iran, khususnya para buruh dan pekerja, dalam menggulingkan pemerintahan yang saat itu dipegang oleh Shah. Terjadi pertumpahan darah karena pada awalnya rezim Shah tidak menginginkan adanya revolusi dari bawah tersebut. Pemerintah pun menurunkan kekuatan militer untuk menumpaskan massa yang turun ke jalan. Adanya pertumpahan darah dan rezim Shah yang masih saja tidak ingin turun dari jabatannya pada kala itu,

masyarakatpun mulai menggunakan langkah lain, yaitu dengan melakukan mogok kerja (dilakukan oleh buruh). Selain itu, buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana Islam (Syi'ah) menjadi basis pemerintahan Iran yang baru dibawah Khomeni, yang didukung oleh gerakan-gerakan radikal Islam. Namun, oknum-oknum radikal ini tidak memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat Iran. Hal ini dikarenakan, adanya kejanggalan yang ditutupi oleh pemerintahan masa Khomeni, dengan propaganda-propaganda mereka setelah aksi revolusioner pada tahun 1979, serta adanya aturan-aturan atas dasar agama Islam, yg merugikan pihak-pihak tertentu.

Sejarah merupakan salah satu hal yang perlu di pelajari apabila ingin melakukan penelitian terhadap suatu negara. Sejarah seakan memberikan petunjuk mengenai apa yang terjadi pada masa ini, merupakan keterkaitan dari sejarah masa lalu suatu negara tersebut. Begitu juga dengan Iran. Adanya basis Islam yang melekat pada negara ini, juga dapat ditelusuri dari sejarahnya. Revolusi Iran 1979 dianggap sebagai salah satu titik balik terhadap adanya diskriminasi terhadap perempuan. Iran yang saat itu dipimpin oleh Khomeni, mulai mengadopsi aturan-aturan yang diskriminatif. Belajar dari sejarah revolusi tersebut, menjadi salah satu kunci latar belakang terjadinya ketidaksetaraan gender di Iran, dan pada saat itu pun, banyak masyarakat Iran yang tidak menyetujui hal tersebut. Sebagian masyarakat Iran seakan telah menyadari adanya kejanggalan dalam sistem pemerintahan sejak masa pemerintaha Khomeni dimulai.

1.5 Kerangka Pemikiran

Teori yang tepat yang dapat digunakan untuk dapat membawahi isu ini adalah pluralisme. Terdapat empat kunci utama dalam teori pluralisme, yaitu²⁰; pertama, aktor non negara juga merupakan aktor yang penting dalam dunia internasional. Dalam hal ini, NGO, Organisasi Internasional, dan bahkan individu atau kelompok turut berpartisipasi dalam dunia politik internasional. Misalnya peran organisasi internasional seperti PBB, dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan yang dibuat oleh negara, serta berperan untuk menjaga perdamaian dunia; kedua, negara bukanlah satu-satunya aktor internasional, karena dalam dunia internasional terdapat individu atau kelompok, *interest groups*, dan birokrasi. Misalnya, dalam suatu negara, terciptanya kebijakan merupakan hasil dari *lobbying* dari beberapa pihak yaitu pemerintah, individu, interest groups, hingga MNC; ketiga, pluralisme ingin membantah pernyataan dari realisme yang menyatakan bahwa *state* adalah *rational actor*. Terkadang, negara tidak memenuhi keinginannya sendiri dalam membuat kebijakan, dan terkadang perlu mementingkan kepentingan dari aktor-aktor lainnya; terakhir, agenda dunia internasional sangat luas, dan tidak hanya soal national security (meski tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga merupakan hal yang penting). Pluralis menyatakan bahwa faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, dan interdependensi²¹.

Teori Feminisme yang digunakan dalam teori ini adalah Feminisme Liberal, dimana para aktivis berjuang untuk mencapai kesetaraan keduabelah pihak, baik

²⁰ Paul R. Viotti dan Mark V Kauppi, *International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*, 3rd ed, 200-215 (Boston: Allyn and Bacon, 1998)

²¹ Ibid.

laki-laki maupun perempuan. Adapun, feminisme liberal yang digunakan adalah feminisme liberal abad 20. Feminisme pada masa ini, lebih memfokuskan diri dalam memberikan kesetaraan antara kedua gender²². Dalam Feminisme Liberal dijelaskan pula bahwa para perempuan pada tahun 1960 banyak menggunakan organisasi non-profit sebagai salah satu sarana bagi para perempuan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, organisasi non-profit juga digunakan untuk meningkatkan kesadaran bagi para perempuan lainnya mengenai hak dan peran mereka yang telah lama hilang karena adanya patriarki, kapitalisme yang berlebihan, individualisme, dan juga pemerintahan yang terkesan hanya pro kepada kaum elit²³.

Menurut Betty Friedan seorang penulis yang memfokuskan tulisannya pada feminisme liberal, meskipun terfokus pada perubahan bagi kaum perempuan, para penganut feminisme liberal menganggap bahwa adanya masyarakat yang ideal adalah pembagian peran antara perempuan dan laki-laki yang sesuai dan tanpa diskriminasi. Feminisme Liberal memberikan pandangan bahwa untuk menghadapi maskulinitas itu sendiri adalah dengan merangkul segala aspek, dan bukan dengan meninggikan salah satu pihak saja²⁴. Selain itu, dalam tulisannya yang berjudul *Feminist Mystique*, Friedan ingin menunjukkan bahwa perempuan berhak atas segala pilihannya dan bukan hanya bergantung pada suami sebagai ibu rumah tangga semata²⁵.

²² Rosemarie Tong, *Feminist Thought*, (North Carolina: Westview Press, 2014), 24

²³ Ibid. 25

²⁴ Ibid. 32

²⁵ Ibid 32

Teori yang digunakan untuk menunjukkan tahapan-tahapan serta perkembangan dari *One Million Signatures* adalah teori Gerakan Sosial. Teori gerakan sosial bertujuan untuk mendefinisikan adanya gerakan-gerakan yang berasal dari masyarakat, yang cenderung mengubah tatanan baik sosial, politik, maupun ekonomi. Biasanya, gerakan sosial atau *social movement* dilakukan untuk mencapai goal atau tujuan tertentu²⁶. Adanya teori ini menunjukkan kekhawatiran mengenai adanya tindakan dari masyarakat, yang berasal dari ketidakadilan yang dirasakan oleh kumpulan individu tersebut.

Teori gerakan sosial ini juga dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu²⁷:

1. *Deprivation theory*. Teori ini terjadi karena adanya sekelompok masyarakat yang merasa bahwa kepentingannya tidak terpenuhi, seperti sumber daya, barang tertentu, maupun pelayanan tertentu. *Deprivation theory* ini sendiri dibagi menjadi dua; *absolute deprivation* dan *relative deprivation*. Teori ini memberikan penjelasan yang cukup untuk mengetahui penyebab suatu gerakan sosial terjadi, namun, teori ini perlu dilengkapi dengan faktor-faktor lain dari penyebab suatu gerakan sosial terjadi.
2. *Resource mobilization theory*. Resource atau sumber daya yang dimaksud dalam teori ini adalah uang, ketenagakerjaan, status sosial, pengetahuan, serta dukungan dari media maupun elit politik. Teori ini sendiri ingin

²⁶ Jonathan Christiansen "Four Stages of Social Movement", *Research Starters*, Diakses pada 18 Maret 2018, <https://www.ebscohost.com/uploads/imported/thisTopic-dbTopic-1248.pdf>

²⁷ Sen, Anindya, and Omer Avci. "Why Social Movement Occur: Theories of Social Movement." *The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management* 9 (2016): 125-30. Accessed March 18, 2018. <http://www.beykon.org/dergi/2016/SPRING/2016XII.10.A.Sen.pdf>

menunjukkan bahwa sumber daya yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki kemampuan untuk mengurangi keluhan yang terjadi diantara masyarakat. Salah satu hal yang menjadi kekurangan dari teori ini adalah, teori ini tidak dapat membuktikan bahwa semua gerakan sosial terjadi karena adanya sumber daya tersebut.

3. *Political Process Theory*. Dalam teori ini, gerakan sosial ditujukan kepada pemerintahan yang saat itu sedang berkuasa, dengan mengedepankan beberapa faktor seperti kondisi politik saat itu, dan kekurangan pemerintah pada saat itu. Namun, teori ini dianggap terlalu fokus pada politik, padahal kebudayaan juga memiliki pengaruh besar tentang bagaimana pemerintah menjalankan masa pemerintahannya.
4. *Structural Strain Theory*. Teori ini beranggapan bahwa adanya gerakan sosial dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu; masyarakat sekitar merasakan hal yang sama; masyarakat lain mengakui bahwa permasalahan ini benar terjadi; adanya ideologi yang mempengaruhi perkembangan isu tersebut; adanya peristiwa yang menyebabkan isu tersebut terjadi; masyarakat maupun pemerintah mau terbuka untuk menerima perubahan; adanya mobilisasi sumber daya selama gerakan sosial berlangsung.
5. *The New Social Movement Theory*. Teori ini seakan tidak menghiraukan teori Marxist mengenai gerakan sosial yang biasanya berhubungan dengan isu-isu tradisional seperti perekonomian dan politik. Teori ini ingin menambahkan beberapa poin penting dalam berbagai gerakan sosial yang terjadi, yang seringkali disertai dengan adanya isu-isu seperti etnis, gender,

serta identitas. Permasalahan yang diangkat dalam NSMT lebih mengarah pada adanya kepentingan dari masing-masing individu, dan mengarah pada kemanusiaan itu sendiri.

Terdapat empat tahap dalam gerakan sosial yaitu²⁸;

1. *Emergence*. Tahap ini merupakan tahap awal dalam munculnya gerakan sosial. Dalam tahap ini, tidak terdapat organisasi kemasyarakatan yang turut serta. Gerakan sosial yang terjadipun cenderung terjadi akibat adanya ketidaksetujuan terhadap suatu isu atau kebijakan, maupun kondisi sosial yang saat itu terjadi, namun, mereka yang tidak setuju, belum melakukan tindakan yang lebih besar. Tindakan yang dilakukan pun cenderung bersifat individu dan tidak kolektif, seperti dengan menyampaikan pendapat mengenai ketidaksetujuan mereka kepada kerabat, ataupun menulis artikel kepada surat kabar maupun media lainnya.
2. *Coalescence*. Dalam tahap ini, hal-hal yang menjadi ketidakadilan atau ketidaksetujuan dalam masyarakat disetujui oleh sekelompok masyarakat, ataupun suatu komunitas, namun mereka tidak melakukan apapun untuk merubah kebijakan tertentu. Mereka cenderung hanya ‘mengeluh’ satu sama lain mengenai suatu isu. Tahap ini juga memberi kesadaran pada orang lain yang tidak menyadari adanya isu tersebut.
3. *Bureaucratization*. Pada tahap ketiga, gerakan sosial ini telah sukses memberikan pengertian/menyadarkan masyarakat lain mengenai isu tertentu yang tidak sesuai bagi beberapa pihak. Dalam tahap ini juga, masyarakat

²⁸ Ibid.

mendapatkan bantuan dari organisasi-organisasi tertentu yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan isu yang akan diselesaikan. Adanya organisasi-organisasi tersebut juga akan membantu masyarakat dalam menyampaikan pesannya kepada lembaga pemerintahan.

4. *Decline*. Dalam tahap terakhir, gerakan sosial sudah mulai menurun. Adanya penurunan dalam gerakan sosial ini dapat terjadi karena; represi, kooptasi, sukses, dan gagal.

Isu ketidaksetaraan gender ini, merupakan isu yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Untuk itu, digunakan teori *Human Rights* yang dapat menjelaskan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Iran, serta menunjukkan bahwa Iran kurang memerdulikan beberapa faktor yang menjadi isu yang harusnya diatasi oleh negara. *Human rights* pertama kali berkembang setelah Perang Dunia II, dimana pada saat itu, dunia menyadari bahwa selain *traditional security*, negara juga perlu memenuhi unsur human security atau yang juga dikenal dengan *non traditional security*. *Human rights* sendiri diklasifikasikan menjadi tiga generasi, yaitu²⁹; Generasi pertama dari *human rights*, fokus pada adanya adanya hak sipil dan kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam politik, serta meminimalisir adanya campur tangan yang berlebihan pemerintah pada masyarakat sebagaimana tercantum dalam ICCPR. Negara pun diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, serta dapat menghargai keputusan yang dibuat oleh individu dalam negara seperti agama, politik, hidup

²⁹ Gregory J. Walters "Introduction Human Rights In Theory And Practice", *Saint Paul University*, diakses pada 18 Meret 2018 <https://ustpaul.ca/upload-files/EthicsCenter/HumanRightsTheory&Practice-Walters.pdf>

tanpa diskriminasi, dan sebagainya; generasi kedua *human rights*, tercantum dalam ICESCR meliputi ekonomi, sosial dan budaya. Negara diharapkan untuk dapat mampu memaksimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk menyediakan kesempatan kerja, memberikan keaman secara sosial, hak untuk bertempat tinggal, edukasi, serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kultur atau budayanya; Generasi ketiga dari *human rights* melibatkan solidaritas dari negara-negara maju sebagai satu-kesatuan, maupun kesepakatan dari negara secara umum³⁰.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti suatu keadaan yang berhubungan dengan permasalahan sosial. Metode kualitatif juga dilengkapi dengan latar belakang permasalahan yang jelas. Hasil dari penelitian kemudian diolah dan diinterpretasi yang menghasilkan suatu makna tertentu³¹. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta secara sistematis dan akurat³². Dalam hal ini, metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta mengenai ketidakadilan Iran dalam menciptakan kebijakan yang sesuai dengan semua

³⁰ Ibid.

³¹ John Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, (United States of America: Library of Congress Cataloging in Publication Data) 2014

³² Suryana "Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", Universitas Pendidikan Indonesia, diakses pada 18 Maret 2018 https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf

gender. Selain itu, fakta-fakta mengenai upaya para perempuan Iran untuk mengatasi isu tersebut juga akan diteliti.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan fakta-fakta berdasarkan data yang telah ada sebelumnya, baik melalui buku, jurnal, maupun artikel, dan tidak diperoleh langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber lain.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa Bab pembahasan. Bab I membahas pendahuluan, untuk menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta kerangka pemikiran dan metode penelitian. Dalam Bab II, penelitian ini berfokus pada sejarah Revolusi Iran pada tahun 1979 yang merupakan tolak ukur terjadinya ketidaksetaraan gender di Iran, serta membahas hukum yang terlampir dalam *Civil Code*, maupun *Penal Code*, yang menunjukkan ketidakadilan bagi kaum perempuan. Pada bab III, dibahas mengenai sejarah awal *One Million Signatures campaign* sebagai pionir gerakan-gerakan perempuan lainnya, dalam mengatasi isu ketidaksetaraan gender yang terjadi di Iran. Dalam Bab IV, dibahas mengenai tahapan-tahapan yang dilalui oleh *One Million Signatures* sebagai gerakan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Penelitian ini ditutup pada bab V, dengan melakukan pembahasan mengenai kesimpulan.